

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Uni Eropa memiliki dampak pada kesempatan Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendapatkan visa Schengen. Dampak tersebut tidak hanya tampak pada aspek-aspek administrasi pengajuan visa, melainkan juga terkait dengan level keyakinan, keekatan hubungan diplomatik, dan kedudukan Indonesia dalam tatanan pergerakan internasional Uni Eropa. Dalam kerangka ini, kebijakan visa Schengen bukanlah sekadar metode imigrasi teknis, namun merupakan komponen dari sistem global yang mengatur perpindahan antarnegara melalui serangkaian ketentuan, kaidah, dan tahapan spesifik.

Studi ini menggambarkan bahwa hubungan Indonesia dan Uni Eropa berkembang ke arah yang lebih luas dan penting. Kolaborasi yang ada tidak hanya terpusat pada sektor ekonomi, tetapi juga melibatkan diskusi politik, sinkronisasi urusan konsuler, pengajaran, penjagaan warga, serta konektivitas antarmanusia. Berbagai bentuk kolaborasi tersebut secara tak langsung menciptakan pandangan positif terhadap Indonesia sebagai negara rekan yang bersedia bekerja sama dan memiliki janji terhadap pengaturan pergerakan internasional. Dalam keadaan seperti ini, kemudahan akses visa menjadi salah satu wujud pengakuan atas level keyakinan yang dibentuk melalui hubungan antarnegara.

Dengan menggunakan sudut pandang teori rezim internasional Krasner, sistem visa Schengen dapat dipahami sebagai elemen dari rezim pergerakan dunia yang mempunyai prinsip, kaidah, peraturan, dan prosedur yang sama. Indonesia menempati posisi sebagai negara yang bukan anggota yang harus mengikuti standar yang telah ditetapkan Uni Eropa. Oleh sebab itu, berbagai kolaborasi dua sisi dan regional yang dilakukan Indonesia merupakan bentuk penyesuaian terhadap rezim tersebut. Semakin tinggi kemampuan Indonesia dalam menunjukkan kepatuhan pada peraturan pergerakan internasional, semakin tinggi pula kesempatan terbangunnya keyakinan dari negara-negara Schengen terhadap WNI.

Penelitian ini juga menemukan bahwa mobilitas internasional masih belum merata di antara berbagai negara. WNI masih menghadapi prosedur administrasi visa yang cukup memakan waktu, kebutuhan dokumen yang rumit, dan penilaian yang pilih-pilih jika dibandingkan dengan warga negara lain yang memiliki paspor lebih kuat. Keadaan ini menunjukkan bahwa aturan visa masih dipengaruhi oleh pandangan tentang kestabilan, kemungkinan risiko imigrasi, dan citra negara asal pelamar. Oleh karena itu, kekuatan sebuah paspor tidak hanya terkait dengan kemampuan finansial suatu negara, tetapi juga bagaimana negara tersebut dilihat dalam tatanan internasional.

Di samping itu, penerapan kebijakan visa berjenjang oleh Uni Eropa kepada WNI menandakan adanya pergeseran dalam interaksi mobilitas antara Indonesia dan wilayah Schengen. Dengan diberikannya visa masuk ganda yang berlaku lama kepada para pelamar yang memiliki riwayat perjalanan bagus, terlihat adanya peningkatan kepercayaan terhadap WNI. Kebijakan tersebut menjadi petunjuk bahwa hubungan kolaborasi yang telah terjalin melalui diplomasi, penyelarasan konsuler, pendidikan, dan perpindahan penduduk memengaruhi aturan visa yang diterapkan Uni Eropa bagi Indonesia.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan mendapatkan visa Schengen bagi WNI dipengaruhi oleh hubungan kolaborasi internasional yang berkembang secara bertahap dan terus-menerus. Visa tidak hanya sekadar dokumen perjalanan, namun juga mencerminkan posisi sebuah negara dalam kerangka mobilitas global. Untuk itu, penguatan ikatan diplomatik, peningkatan kolaborasi strategis, serta konsistensi Indonesia dalam membangun reputasi sebagai negara yang mematuhi standar internasional akan menjadi elemen krusial dalam memperluas akses mobilitas WNI di waktu mendatang.

#### **4.2 Saran**

Penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia, institusi terkait, dan peneliti berikutnya. Pertama, pemerintah Indonesia harus meningkatkan transparansi dan aksesibilitas data terkait mobilitas internasional WNI, khususnya terkait pengajuan

visa Schengen. Dalam proses penelitian ini, penulis menemukan bahwa data mengenai jumlah WNI yang mengajukan visa Schengen, tingkat persetujuan dan penolakan visa, serta perbandingan kondisi sebelum dan sesudah penerapan kebijakan visa cascade masih sangat terbatas dan sulit diakses. Sebagian besar data yang saat ini tersedia belum disajikan secara sistematis oleh lembaga resmi Indonesia, dan sebagian besar hanya bersifat umum dan tersebar di berbagai sumber. Meskipun demikian, akses data yang akurat sangat penting untuk mengevaluasi seberapa efektif kerja sama mobilitas antara Indonesia dan Uni Eropa, dan juga merupakan dasar untuk pembentukan kebijakan internasional.

Kemudian, pengalaman WNI dalam proses pengajuan visa Schengen harus ditingkatkan oleh pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Selama beberapa waktu, orang lebih banyak membahas masalah administratif yang dihadapi pemohon melalui pengalaman pribadi mereka di komunitas perjalanan, media sosial, dan forum online. Masalah-masalah ini termasuk alasan penolakan visa yang tidak jelas, lama proses evaluasi, tingginya biaya pengajuan, dan kompleksitas persyaratan dokumen. Namun, belum ada kebijakan atau evaluasi yang konkret dan berkelanjutan yang dibuat untuk menangani keluhan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara perhatian institusional terhadap masalah mobilitas internasional WNI dan pengalaman masyarakat di lapangan.

Ketiga, pemerintah Indonesia harus mendorong dialog konsuler yang lebih aktif dengan negara-negara anggota Schengen. Ini penting terutama untuk melindungi hak pemohon visa dan meningkatkan ketelusan proses pengajuan visa. Meskipun negara tujuan berhak menetapkan kebijakan visa, Indonesia masih dapat memperkuat posisi diplomatiknya dengan bekerja sama dengan negara lain secara bilateral maupun regional untuk membuat proses pengajuan visa bagi WNI menjadi lebih jelas, konsisten, dan transparan. Upaya ini sangat penting karena semakin banyak orang Indonesia yang bepergian ke Eropa untuk berbagai alasan, termasuk pendidikan, bisnis, pariwisata, dan pekerjaan. Ini membutuhkan sistem mobilitas yang tidak hanya aman tetapi juga memberikan akses yang lebih adil.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa studi hubungan internasional di Indonesia jarang mempelajari secara menyeluruh masalah visa dan mobilitas internasional. Ini terutama berlaku untuk studi yang berfokus pada peran WNI sebagai aktor mobilitas global. Akibatnya, peneliti yang akan datang diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih empiris dengan menggunakan data primer yang lebih luas, seperti jejak pendapat pemohon visa, wawancara dengan kedutaan, atau analisis statistik mengenai tingkat persetujuan visa Schengen bagi WNI. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat memperluas fokus kajian pada perbandingan kebijakan visa Indonesia dengan negara berkembang lainnya di Asia Tenggara. Ini akan menunjukkan posisi Indonesia dalam struktur visa.

Dalam tulisan ini terlihat bahwa akses mobilitas internasional bukan hanya masalah administrasi namun juga berkaitan dengan hubungan kekuasaan, tingkat kepercayaan antarnegara, dan posisi suatu negara dalam sistem internasional. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akses visa bagi WNI, diperlukan kolaborasi yang tidak hanya bersifat diplomatik, tetapi juga pembenahan data, perlindungan warga negara, dan perhatian yang lebih besar pada situasi kehidupan nyata warga negara yang menghadapi sistem visa internasional.